



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bobby Chriss Siagian

Jabatan : Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Edi Prio Pambudi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Regional



Bobby Chriss Siagian

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	1.1	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	100%
		1.2	Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT	100%
2.	Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	85%
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	3 dari 4
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	92%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional

Total

(Empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 4.333.496.000,-

Rp. 4.333.496.000,-

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional



Bobby Chriss Siagian

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

KODE IKU: 1.1

Sasaran Strategis

SS.1.Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Deskripsi Sasaran Strategis

Kerja sama ekonomi regional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama regional yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama regional yang dimaksud mencakup kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama regional. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati

Deskripsi IKU

Definisi

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi regional yang menghasilkan komitmen konkret.

Efektivitas kerja sama ekonomi regional diukur berdasarkan jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati. Komitmen tersebut merupakan kesepakatan yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan negara mitra pada forum regional di mana Kemenko Perekonomian menjadi koordinator dan ketua pelaksanaannya.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2026 sebanyak 5 Komitmen sebagai berikut:

1. Komitmen Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
2. Komitmen Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
3. Komitmen Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29;
4. Komitmen Hasil BIMP-EAGA Summit ke-17;
5. Komitmen Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026.

Formula

$$\text{Tingkat Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah Komitmen yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Komitmen yang Ditargetkan Selesai (5)}} \times 100\%$$

	Tujuan
	Mengukur Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional
Sumber Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....)Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	80%	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	0%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	20%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

KODE IKU: 1.2

Sasaran Strategis

SS.1.Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Deskripsi Sasaran Strategis

Kerja sama ekonomi regional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama regional yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama regional yang dimaksud mencakup kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama regional. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 1.2 Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT

Deskripsi IKU

Definisi

IKU ini mengukur persentase penyelesaian rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri *Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada saat Indonesia berperan sebagai *host country*. Penetapan indikator ini secara terpisah dari IKU efektivitas kerja sama ekonomi regional dilakukan untuk mencerminkan peningkatan peran, tanggung jawab, dan kompleksitas koordinasi Indonesia dalam penyelenggaraan forum PTM IMT-GT.

Sebagai *host*, Indonesia tidak hanya berperan dalam perumusan substansi kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan kesiapan agenda, koordinasi lintas kementerian/lembaga, fasilitasi pelaksanaan pertemuan, serta kesinambungan proses pengambilan keputusan di tingkat menteri. Oleh karena itu, penyelesaian rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ditetapkan sebagai indikator kinerja tersendiri yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kerja sama ekonomi regional.

IKU dinyatakan tercapai apabila seluruh rencana aksi Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT terlaksana. Adapun rencana aksi yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 dengan K/L terkait;
4. Penyusunan Kertas Posisi Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
5. Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;

6. Penyusunan Rekomendasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
7. Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
8. Publikasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32; dan
9. IMT-GT Advisory Committee Meeting.

Formula

$$\text{Persentase Penyelesaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi yang terlaksana}}{\text{Jumlah Rencana Aksi yang ditargetkan (9)}} \times 100\%$$

Tujuan

Mengukur Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Sumber Data

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Tingkat Kendali IKU

High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU

Exact Proxy Activity

Jenis Konsolidasi Periode

Sum Average Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

Cascading Peta Cascading Non Peta Non-Cascading

Metode Cascading

Direct Indirect

Polarisasi IKU

Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan

Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	80%	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

KODE IKU: 2.1

Sasaran Strategis

SS.2.Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi regional yang menjalankan fungsinya sebagai:

- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi regional;
- b. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi regional;
- c. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi regional;
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi regional; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi serta Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap tiga sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait kerja sama ekonomi regional, antara lain:

- 1) Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
 - Penandatanganan DEFA;
 - Penyelesaian Substansial ACAFTA.
- 2) Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;

- Rekomendasi Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
 - Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT;
 - Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29;
 - Joint Statement BIMP-EAGA Summit ke-17;
 - Rekomendasi Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026.
- 3) Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
- Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA;
 - Pengesahan Protokol ASEAN-MNP.

Rekomendasi kebijakan yang dimaksud mencakup: penyelesaian komitmen yang telah disepakati, partisipasi aktif dalam forum regional, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil forum. Produk keluaran dari proses ini antara lain berupa: notula rapat, *policy brief*, dokumen rekomendasi kebijakan, laporan kegiatan, hingga laporan evaluasi kebijakan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Kertas Posisi Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
- Kertas Posisi Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
- Kertas Posisi Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT;
- Kertas Posisi Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA;
- Kertas Posisi BIMP-EAGA Summit;
- Kertas Posisi APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026;
- Notula/Bahan Persiapan Perundingan atau Legal Scrubbing DEFA;
- Notula/Bahan Persiapan Perundingan ACAFTA;
- Notula rapat harmonisasi Rperpres Protokol Kedua AANZFTA;
- Notula rapat harmonisasi Protokol ASEAN-MNP.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);

- Rumusan perencanaan program;
 - Memo Kebijakan;
 - Juklak/Juknis;
 - Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
 - Buku Referensi Kebijakan;
 - Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
 - Laporan Hasil Evaluasi;
 - Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
 - Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).
- Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:
- Laporan Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
 - Surat Deputi terkait Tindak Lanjut/ Laporan Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
 - Surat Deputi terkait Tindak Lanjut/ Laporan Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT;
 - Surat Deputi terkait Tindak Lanjut/ Laporan Hasil PTM BIMP-EAGA ke-29;
 - Surat Deputi terkait Tindak Lanjut/ Laporan Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17;
 - Laporan Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026;
 - Hasil Perundingan/ Legal Scrubbing DEFA;
 - Hasil Lanjutan Perundingan ACAFTA;
 - Pembubuhan Paraf Menteri pada RPerpres Protokol Kedua AANZFTA;
 - Pembubuhan Paraf Menteri pada RPerpres Protokol ASEAN-MNP.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT;
- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA;
- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit;
- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026;
- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Penandatanganan DEFA;
- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelesaian Substansial ACAFTA;
- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA;
- Brafaks/Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengesahan Protokol ASEAN-MNP.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik

terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah: L

- Publikasi terkait Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
- Publikasi terkait Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
- Publikasi terkait Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT;
- Publikasi terkait Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA;
- Publikasi terkait Hasil BIMP-EAGA Summit;
- Publikasi terkait Hasil APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026;
- Publikasi terkait Penandatanganan DEFA;
- Publikasi terkait Penyelesaian Substansial ACAFTA;
- Publikasi terkait Hasil Pengesahan Protokol Kedua AANZFFTA;
- Publikasi terkait Hasil Pengesahan Protokol ASEAN-MNP.

Formula

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Sumber Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(.....) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...)Semesteran (..) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	75%	75%	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	10%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	30%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	50%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	75%	75%	85%

Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3,65	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3,66	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 4.1

Sasaran Strategis

SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level kedeputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Regional.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja 2026, Rencana Aksi dan Manual IKU;
2. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja;
3. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan;
4. Penyusunan Renja 2026;
5. Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026;
6. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko;
7. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi; dan
8. Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027.

Formula

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Tujuan

Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi/ Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Sumber Data

Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian

Tingkat Kendali IKU

High (....) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(....) Exact Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (.....) Average Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta

Metode Cascading

Direct Indirect

Polarisasi IKU

Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan Triwulanan (....) Semesteran

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85%	85%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	85%	92%

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	100%	Penguatan Kualitas Substansi dan Koordinasi dalam Perumusan Komitmen Kerja Sama Ekonomi Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan HLTF-EI ke-49 • Menghadiri Pertemuan HLTF-EI ke-49 • Menyusun Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 • Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan APEC Economic Committee ke-1 • Menghadiri Pertemuan APEC Economic Committee ke-1 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan AEC Council ke-27 • Menghadiri Pertemuan AEC Council ke-27 • Menyusun Laporan Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 • Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan KTT ASEAN ke-48 • Menghadiri KTT ASEAN ke-48 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan HLTF-EI ke-50 • Menghadiri Pertemuan HLTF-EI ke-50 • Menyusun Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-50 • Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan APEC Economic Committee ke-2 • Penyampaian rekomendasi untuk Pertemuan APEC Economic Committee ke-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan AEC Council ke-28 • Menghadiri Pertemuan AEC Council ke-28 • Menyusun Laporan Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-28 • Koordinasi Persiapan Substansi KTT ASEAN ke-49 • Menghadiri KTT ASEAN ke-49 • Koordinasi Persiapan Substansi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17 Menghadiri Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17 Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-2 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29 Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29 Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29
		1.2 Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT	100%	Penguatan Kualitas Penyelenggaraan Rangkaian PTM IMT-GT	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Menyusun Laporan Hasil Koordinasi Persiapan 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 dengan K/L terkait Menyusun Kertas Posisi Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 Publikasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 IMT-GT Advisory Committee Meeting

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Penyelenggara n PTM IMT-GT			
2.	Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	85%	Penyelesaian Komitmen Kerja Sama Ekonomi PTA/FTA/CEPA	<ul style="list-style-type: none"> • Perundingan DEFA • Legal Scrubbing DEFA 	<ul style="list-style-type: none"> • Legal Scrubbing DEFA • Perundingan ACAFTA 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundingan ACAFTA 	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan DEFA • Penyelesaian Substansial ACAFTA
				Penguatan Kualitas Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Kertas Posisi Pertemuan HLTF-EI ke-49 • Menyusun Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 • Menindaklanjuti Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 • Publikasi Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 • Menyusun Kertas Posisi Pertemuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Kertas Posisi Pertemuan AEC Council ke-27 • Menyusun Laporan Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 • Menindaklanjuti Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 • Publikasi Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Kertas Posisi Pertemuan HLTF-EI ke-50 • Menyusun Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-50 • Menindaklanjuti Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-50 • Publikasi Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-50 • Menyusun Kertas Posisi Pertemuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Kertas Posisi Pertemuan AEC Council ke-28 • Menyusun Laporan Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-28 • Menindaklanjuti Hasil Pertemuan AEC Council ke-28 • Publikasi Hasil Pertemuan AEC Council ke-28

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<p>APEC <i>Economic Committee</i> ke-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian rekomendasi untuk Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1 • Menindaklanjuti Hasil Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1 • Publikasi terkait Hasil Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Kertas Posisi Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17 • Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17 • Menindaklanjuti Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17 • Publikasi Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17 	<p>Tingkat Menteri IMT-GT ke-32</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 • Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 • Publikasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 • Menyusun Kertas Posisi Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-2 • Penyampaian rekomendasi untuk pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-2 tahun 2025 • Rekomendasi Hasil Pertemuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Kertas Posisi Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29 • Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29 • Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29 • Publikasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29 • Monitoring dan evaluasi kesepakatan dalam kerja sama APEC

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
							APEC Economic Committee ke-2	
				Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan dan Finalisasi substansi RPerpres Protokol Kedua AANZFTA dan ASEAN-MNP sebelum proses harmonisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi RPerpres Protokol Kedua AANZFTA Harmonisasi RPerpres Protokol ASEAN-MNP 	<ul style="list-style-type: none"> Pembubuhan Paraf Menteri pada RPerpres Protokol Kedua AANZFTA Pembubuhan Paraf Menteri pada RPerpres Protokol ASEAN-MNP 	<ul style="list-style-type: none"> Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA Pengesahan Protokol ASEAN-MNP
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	3 dari 4	Peningkatan Kepuasan Layanan KSP dalam Upaya Penyelesaian Komitmen Kerja Sama dan Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Pelaksanaan dan Pelaporan Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan pemetaan kendala koordinasi lintas K/L serta rencana perbaikan kerja sama ekonomi regional Penguatan <i>engagement stakeholder</i> melalui peningkatan kualitas partisipasi dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian isu kerja sama ekonomi regional dengan Kementerian/Lembaga terkait Penguatan <i>engagement stakeholder</i> melalui peningkatan kualitas partisipasi dalam forum 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerja sama ekonomi regional Penguatan <i>engagement stakeholder</i> melalui peningkatan kualitas partisipasi dalam forum koordinasi kerja sama ekonomi regional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<p>pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas SDM dalam berkoordinasi lintas K/L melalui penyamaan pemahaman substansi kerja sama ekonomi regional 	<p>forum koordinasi kerja sama ekonomi regional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan Pelaporan Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan II 	<p>koordinasi kerja sama ekonomi regional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan Pelaporan Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan III 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan Pelaporan Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan IV
4.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional	4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	92%	Optimalisasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Revisi Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja • Penyusunan Matriks Manajemen Risiko • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
							<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI 	

Jakarta, 31 Januari 2026
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Regional

Bobby C. Siagian